



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
KE WILAYAH KARESIDENAN SURAKARTA PROVINSI JAWA
TENGAH
6-8 FEBRUARI 2018
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2017-2018**

*

**

**

*

JAKARTA 2018



L A P O R A N
HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR-RI
KE WILAYAH KARESIDENAN SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2017-2018
TANGGAL 6-8 FEBRUARI 2018

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib :
 - a. Pasal 58 ayat 3.d. : Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
 - b. Pasal 58 ayat 4 : Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI
4. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk Melakukan Kunjungan Kerja Kelompok pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017 - 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja ini adalah untuk melihat sejauhmana kesiapan Pemerintah dalam hal menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan pokok di wilayah Jawa Tengah, yang mana di beberapa wilayah di Indonesia sudah melaksanakan kegiatan panen raya untuk komoditas padi. Selain itu, Tim Komisi IV DPR RI juga ingin melihat sejauhmana pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di wilayah Karesidenan Surakarta, sehingga dalam hal pendistribusian dan penyalurannya menganut prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu

C. TIM KUNJUNGAN KERJA

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI adalah sebagai berikut, yaitu:

NO.	NO. ANGG.	NAMA	FRAKSI
1.	A-174	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI,SS	F.PDI P
2.	A-220	DR.H. RAHMAT NASUTION HAMKA, SH,M.Si	F.PDI P
3.	A-131	IR. EFFENDI SIANIPAR	F.PDI P
4.	A-319	DRS. H. IBNU MUNZIR	F.PG
5.	A-233	H.M.SALIM FAKHRY, SE.MM	F.PG
6.	A-359	IR.KRT.H. DARORI WONODIPURO, MM	F.P GERINDRA
7.	A-351	H. OO. SUTISNA, SH	F.P GERINDRA
8.	A-391	DR. FELICITAS TALULEMBANG	F.P GERINDRA
9.	A-451	IR. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, SP	F.PD
10.	A-501	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL,SE,MM	F.PAN

NO.	NO. ANGG.	NAMA	FRAKSI
11.	A-71	DRS. H. IBNU MULTAZAM	F.PKB
12.	A-13	DRS. FADHOLI	F.P.NASDEM
13.	A-36	SULAEMAN L. HAMZAH	F.P.NASDEM

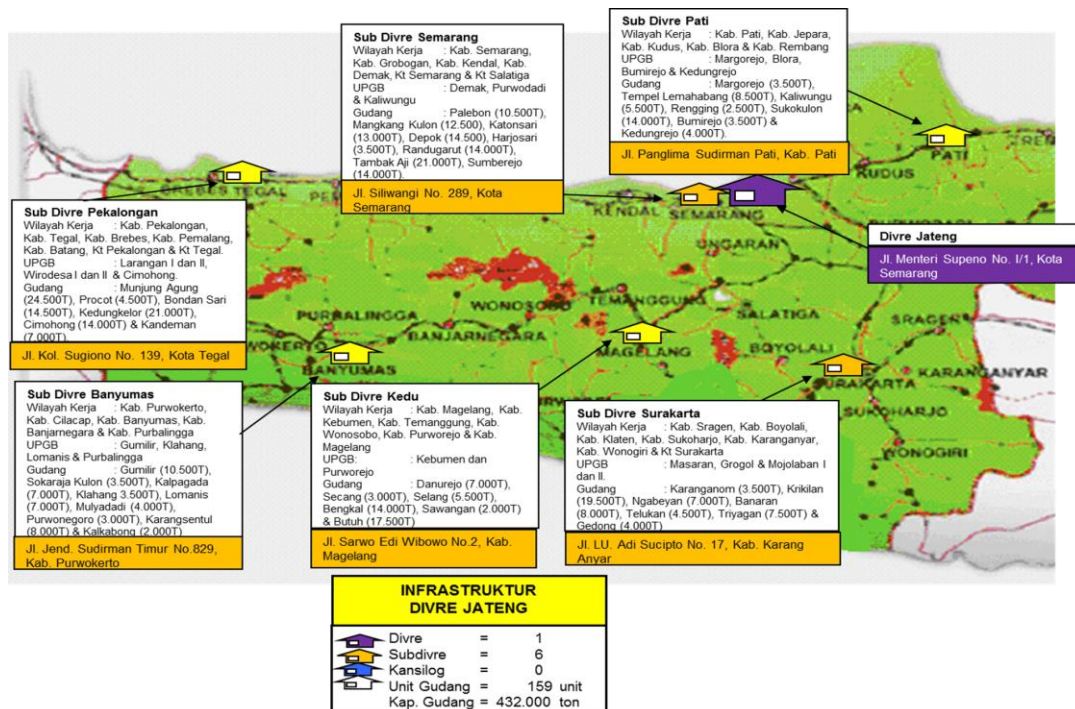
D. WAKTU DAN TEMPAT

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI dilaksanakan pada tanggal 6-8 Februari 2018.

E. KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA

Tim Komisi IV DPR RI meninjau dan melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan serta pejabat terkait di Gudang Bulog Duyungan Sragen, Wilayah Subdivre Surakarta, serta meninjau gudang pupuk di wilayah sragen Jawa Tengah

F. HASIL KUNJUNGAN



Gambar 1. Perum Bulog Divre Jawa Tengah

Pangan adalah kebutuhan dasar warga negara yang wajib disediakan oleh pemerintah sesuai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyediaan Pangan bagi 258 juta jiwa penduduk yang jumlahnya terus bertambah bukan perkara mudah. Sampai saat ini Pemerintah menghadapi berbagai macam persoalan dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan terus meningkat seiring dengan naiknya jumlah penduduk, sedangkan kemampuan produksi Pangan dalam negeri belum mencukupi. Akibatnya impor menjadi pilihan akibat terjadi ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan pangan. Sebagai lembaga yang memegang peranan penting dalam menjaga ketahanan pangan negara, Perum Bulog memiliki kewajiban untuk memperkuat aksesibilitas pangan kepada masyarakat baik secara fisik maupun ekonomi serta berperan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan pokok di masyarakat.

Dukungan penuh diberikan oleh Komisi IV DPR RI kepada Perum Bulog dalam upaya mencapai swasembada pangan. Kunjungan kali ini bertujuan untuk melihat sejauhmana kinerja operasional dan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017, dalam upaya memperkuat aksesibilitas ekonomi dan fisik, serta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan pokok. Selain itu, Tim Komisi IV DPR RI juga melakukan peninjauan ke gudang pupuk guna melihat dan mengetahui ketersediaan serta pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi.

Bulog subdivre surakarta berada dibawah kordinasi Bulog Divre Jawa Tengah, yang secara keseluruhan memiliki kapasitas sebagai berikut (Tabel1).

Tabel 1 Kapasitas Gudang Bulog per Unit Kerja/Subdivre

No	Unit Kerja/Subdivre	Gudang	
		Unit	Kapasitas
1	Semarang	36	101,500
2	Pati	21	41,500
3	Surakarta	33	90,500
4	Banyumas	23	62,500
5	Kedu	20	53,500
6	Pekalongan	26	83,500
	Jumlah	159	433,000

Adapun kinerja operasional Divisi Regional Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Pengadaan Divisi Regional Jawa Tengah 2018

No	DIVRE/SUBDIVRE	Target (Setara Beras)	Realisasi (Setara Beras)
1	SUBDIVRE SEMARANG	453.500	20
2	SUBDIVRE PATI		-
3	SUBDIVRE SURAKARTA		-
4	SUBDIVRE BANYUMAS		46
5	SUBDIVRE KEDU		-
6	SUBDIVRE PEKALONGAN		-
	TOTAL	453.500	66

Berdasarkan Tabel 2, diketahui total realisasi penyerapan setara beras produksi lokal di wilayah Divre Jateng sampai dengan tanggal 4 Februari 2018 adalah 66 Ton. Pada saat kunjungan, Tim Komisi IV DPR RI menerima penjelasan bahwa yang dibutuhkan Bulog divre Jawa Tengah, khususnya sub divre Surakarta adalah dukungan dari pemerintah daerah berupa dorongan bagi petani /Poktan/ Gapoktan untuk mendukung penguatan stok pangan nasional dengan menjual

produksi/ sebagian produksinya kepada Pemerintah (Perum BULOG) untuk stok nasional. Serta dorongan kepada industri perberasan untuk merevitalisasi infrastruktur meningkatkan rendeman dan kualitas beras.

Penyaluran dan Realisasi Rastra/Bansos di Jawa Tengah

Tabel 3. Penyaluran Rastra/Bansos Rastra di Jawa Tengah (satuan kg)

REALISASI PENYALURAN RASKIN / RASTRA 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

TAHUN	RTS	PAGU	REALISASI	%
2013 (REG, R13, R14, R15)	2.482.157	558.485.325	558.485.325	100,00%
2014	2.482.157	446.788.260	446.788.260	100,00%
2015 (REG, R13, R14)	2.482.157	521.252.970	521.252.970	100,00%
2016	2.482.157	446.788.260	446.788.260	100,00%
2017	2.440.902	439.362.360	439.362.360	100,00%

Tabel 4. Realisasi Bansos Rastra per Subdivre

No	Divre / Subdivre Kabupaten / Kota	KPM	Pagu Bansos Januari	Realisasi	%
I	Sub Divre Semarang	332.549	3.325.490	2.506.550	75,37%
II	Sub Divre Pati	354.710	3.547.100	3.547.100	100,00%
III	Sub Divre Surakarta	435.098	4.350.980	4.350.980	100,00%
IV	Sub Divre Banyumas	442.230	4.422.300	3.719.240	84,10%
V	Sub Divre Kedu	390.411	3.904.110	3.904.110	100,00%
VI	Sub Divre Pekalongan	482.682	4.826.820	4.826.820	100,00%
	JUMLAH TOTAL	2.437.680	24.376.800	22.854.800	93,76%

Dukungan dari pemerintah daerah yang dibutuhkan dalam hal peyerapan dan penyaluran Rastra/Bansos kepada Perum Buloga antara lain, percepatan proses verifikasi data BNBA; sosialisasi mekanisme Program Bansos Rastra; dukungan APBD, guna penyaluran Bansos Rastra sampai dengan Titik Bagi (TB); dan sinergi dan koordinasi aktif bersama Pemda, Perum BULOG, serta monitoring berkala dengan Tim Koordinasi Bansos Rastra dari tingkat Provinsi sd tingkat Desa.

Penyaluran CBP Divre Jawa Tengah

Rekapitulasi Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Divre Jawa Tengah

dalam : Kg

URAIAN	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018 *)
Penggunaan CBP					
- Bantuan Darurat/Bencana Alam	1.235.811	291.955	174.974	309.634	18.748
- Pengendalian Harga Beras (OPM)	72.079	-	95.680	863.970	28.037.194
- OPK - CBP RASKIN *	37.232.355	-	-	-	-
Total	38.540.245	291.955	270.654	1.173.604	28.055.942

Bencana Alam Luar Prinlog

NO	SUB DIVRE	BULAN	JUMLAH
		JANUARI	
1	SUBDIVRE WIL. I SEMARANG	18,748.00	18,748.00
JUMLAH		18,748.00	18,748.00

Operasi Pasar

NO	SUB DIVRE	BULAN	JUMLAH
		JANUARI	
1	SUBDIVRE WIL. I SEMARANG	9,773,000.00	9,923,000.00
2	SUBDIVRE WIL. II PATI	7,910,540.00	7,935,540.00
3	SUBDIVRE WIL. III SURAKARTA	3,769,510.00	3,773,510.00
4	SUBDIVRE WIL. IV BANYUMAS	2,900,646.50	2,908,401.50
5	SUBDIVRE WIL. V KEDU	1,303,782.50	1,320,282.50
6	SUBDIVRE WIL. VI PEKALONGAN	2,176,460.00	2,176,460.00
JUMLAH		27,833,939.00	28,037,194.00

Ketahanan Stok Operasional di Divisi Regional Jateng

NO	UNIT KERJA	STOK OPERASIONAL	KETAHANAN STOK
		Ton	Bulan
1	Divre Jateng	73,415	5.00
JUMLAH		73,415	5.00

Rata-rata Ketahanan stok operasional Perum BULOG di Divre Jateng sampai dengan tanggal 31 Januari 2018. Adalah hinga 5 bulan.

G. TEMUAN, ASPIRASI, ATAU TANGGAPAN ANGGOTA

Temuan dan/atau Tanggapan Anggota Tim

Secara umum Tim Komisi IV DPR RI mengapresiasi kualitas beras yang berada di Gudang Duyungan, Sragen. Setelah mendengarkan dan melakukan peninjauan, Tim Komisi IV menilai perlu ada terobosan baru bagi Perum Bulog guna meningkatkan kapasitas dan kinerja Perum Bulog secara menyeluruh, seperti melakukan pengadaan dryer, UPGB, maupun kapasitas penyimpanan. Sehingga dalam menyerap gabah petani dapat dilakukan secara optimal.

Dalam rangka mendukung tercapainya kedaulatan pangan, Tim Komisi IV DPR menilai kedepannya Perum Bulog tidak saja hanya menyerap gabah, namun juga komoditas Jagung dan Kedelai. Selain itu, Perum Bulog diminta melakukan kerjasama dengan BUMN pertanian lainnya untuk melakukan pengawalan/supervisi terhadap proses produksi padi, dari tahapan budidaya dengan memberikan benih padi berkualitas hingga pengolahan pascapanen dan penyaluran beras., yang bertujuan mengurangi potensi loses sebesar 20%.

Aspirasi

1. Komisi IV DPR RI menerima aspirasi dan masukan dari Petani agar mempertimbangkan penggunaan pupuk majemuk, hal ini berdasarkan pertimbangan tidak semua petani dan komoditas membutuhkan pupuk majemuk. Berkaitan dengan hal tersebut, pada saat kunjungan juga diketahui bahwa jumlah RDKK yang ada berada dibawah kebutuhan total.
2. Komisi IV DPR RI juga menerima aspirasi terkait usulan kenaikan HPP beras, karena HPP lama dinilai tidak akan mampu menutup biaya produksi pengelolaan tanaman padi.
3. Komisi IV DPR RI menerima aspirasi terkait usulan permintaan bantuan alat dan mesin pertanian

H. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI mengajak semua pihak untuk mengakhiri perdebatan panjang terkait masalah ketersediaan pangan, khususnya beras. Selanjutnya, Komisi IV berharap, importasi beras yang sudah dilakukan pemerintah, dijadikan penguatan cadangan pangan, sehingga tidak akan terlalu berpengaruh atas harga di tingkat produsen maupun pasar.
2. Komisi IV DPR RI meminta pemerintah memberi dukungan penuh kepada Perum Bulog dalam melakukan penugasan sebagai lembaga stabilisator pangan nasional. Lebih lanjut lagi, Bulog sebagai lembaga pencipta kedaulatan pangan nasional, harus diberi ruang yang maksimal dan dana penugasan di depan. Komisi IV DPR RI meminta agar cadangan beras Bulog pun harus diperbesar, bukan 8% lagi tetapi menjadi 20%. Sehingga, akan ideal untuk mengatasi berbagai gejolak harga yang ada di lapangan.
3. Komisi IV DPR RI akan menyampaikan kepada Pemerintah serta memperjuangkan aspirasi dari Petani berkaitan dengan bantuan alsintan, maupun adanya peningkatan HPP beras karena dinilai HPP yang berlaku saat ini belum mampu menutup biaya produksi budidaya padi.
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada PT Pupuk Indonesia dan Perum Bulog untuk tetap mengoptimalkan kinerja operasional dalam mendukung pencapaian kedaulatan pangan nasional.
5. Komisi IV DPR RI meminta kepada seluruh pihak untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan pokok, sehingga tidak merugikan petani sebagai produsen dan juga konsumen. Secara khusus meminta agar keputusan/kebijakan impor jangan sampai menjatuhkan psikologis petani sebagai produsen pangan

I. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI ke Wilayah Karesidenan Surakarta Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat bermanfaat dan dapat di tindaklanjuti.

Jakarta, Februari 2018

KOMISI IV DPR RI
KETUA TIM,

Edhy Prabowo, MM, MBA
A-335

